

MAKALAH
ISU KONTEMPORER AKUNTANSI

Disusun guna memenuhi Tugas Mata Kuliah Teori Akuntansi

Dosen Pengampu :

Dr. Pujianti, S.Pd., M.Pd.

Galuh Sandi, M.Pd.



Disusun Oleh Kelompok 13

- | | |
|-----------------------|------------|
| 1. Indah Rahma Alfiah | 2413031015 |
| 2. Alya Khoirun Nisa | 2413031019 |
| 3. Susanti | 2413031034 |

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN EKONOMI
JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG

2025

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan makalah ini dengan baik. Makalah ini disusun untuk memenuhi tugas Mata Kuliah Teori Akuntansi dengan judul **“Isu Kontemporer dalam Akuntansi”**.

Dalam proses penyusunan makalah ini, penulis banyak mendapatkan bantuan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada **Ibu Dr. Pujiati, S.Pd., M.Pd.**, dan **Galuh Sandi, M.Pd.** selaku Dosen Pengampu Mata Kuliah Teori Akuntansi yang telah memberikan arahan dan pengetahuan yang sangat berharga dalam penyusunan makalah ini.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang telah membantu dan memberikan masukan selama proses penyusunan makalah ini. Penulis menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari sempurna, sehingga kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan untuk perbaikan di masa yang akan datang.

Akhir kata, penulis berharap semoga makalah ini dapat memberikan wawasan dan pemahaman bagi pembaca mengenai berbagai isu kontemporer yang berkembang dalam bidang akuntansi serta manfaatnya bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan dunia pendidikan.

Bandar Lampung, 3 November 2025

Kelompok 13

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Pengantar	1
1.2 Rumusan Masalah.....	2
1.3 Tujuan Penulisan	2
BAB II	3
PEMBAHASAN	3
2.1 Pengertian Isu Kontemporer Akuntansi	3
2.2 Isu Kontemporer dalam Akuntansi	3
2.3 Pelaporan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Serta Pelaporan Berkelanjutan (Sustainability Reporting)	5
2.4 Dampak UU Akuntan Publik Terhadap Perkembangan Profesi.....	12
2.5 Pendidikan Akuntansi dan Gelar CPA Di Indonesia	21
2.6 Studi Kasus.....	24
BAB III.....	26
PENUTUP	26
3.1 Kesimpulan.....	26
3.2 Saran.....	26
DAFTAR PUSTAKA	27

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Pengantar

Dalam zaman globalisasi dan digitalisasi sekarang ini, dunia akuntansi mengalami kemajuan yang sangat cepat. Akuntansi tidak lagi hanya tentang mencatat transaksi keuangan, melainkan telah berkembang menjadi alat strategis untuk pengambilan keputusan, evaluasi kinerja, dan laporan mengenai keberlanjutan organisasi. Perubahan dalam dunia bisnis, kemajuan teknologi, dan meningkatnya permintaan transparansi dari para pemangku kepentingan telah menciptakan berbagai isu terkini dalam akuntansi yang perlu dipahami dan diteliti secara mendalam oleh akademisi dan praktisi.

Beberapa isu terkini yang saat ini menjadi perhatian termasuk pelaporan keberlanjutan, akuntansi ramah lingkungan, pemanfaatan teknologi digital dan kecerdasan buatan dalam akuntansi, serta tanggung jawab sosial perusahaan. Isu-isu tersebut memerlukan penyesuaian dengan standar akuntansi internasional dan pergeseran paradigma profesi akuntan dari sekadar penyusun laporan keuangan menjadi mitra strategis yang menciptakan nilai bagi organisasi.

Menyampaikan isu terkini dalam akuntansi menjadi sangat penting karena memberikan kesempatan bagi mahasiswa dan profesional untuk mengenali, menganalisis, serta menawarkan solusi terhadap tantangan yang dihadapi profesi akuntan saat ini. Kegiatan ini juga mengembangkan kemampuan berpikir kritis, komunikasi profesional, dan literasi digital yang sangat diperlukan di dunia kerja modern. Selain itu, pemahaman tentang isu-isu terbaru akan meningkatkan kesadaran etika dan tanggung jawab sosial dalam praktik akuntansi.

Dengan demikian, pembahasan mengenai cara mempresentasikan isu terkini dalam akuntansi bukan hanya relevan dalam konteks akademis, tetapi juga penting untuk mempersiapkan calon akuntan agar dapat menyesuaikan diri dan

memberikan kontribusi dalam menghadapi dinamika global di sektor keuangan dan bisnis. Melalui presentasi yang didasarkan pada data, teori, dan analisis kritis, peserta dapat menunjukkan pemahaman yang mendalam mengenai arah perkembangan akuntansi modern serta pengaruhnya terhadap keberlanjutan organisasi dan ekonomi secara keseluruhan.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apa yang dimaksud dengan isu kontemporer akuntansi?
2. Bagaimana Isu Kontemporer dalam Akuntansi?
3. Bagaimana penerapan pelaporan sosial, lingkungan, dan sustainability reporting dalam perusahaan?
4. Apa dampak UU Akuntan Publik terhadap perkembangan profesi akuntan?
5. Bagaimana peran pendidikan akuntansi dan sertifikasi CPA dalam meningkatkan kualitas profesi akuntan di Indonesia?

1.3 Tujuan Penulisan

1. Untuk Menjelaskan pengertian isu kontemporer akuntansi.
2. Untuk Menjelaskan Isu Kontemporer dalam Akuntansi
3. Untuk Mendeskripsikan pelaporan sosial, lingkungan, dan sustainability reporting.
4. Untuk Menganalisis dampak UU Akuntan Publik terhadap profesi akuntan.
5. Untuk Menjelaskan peran pendidikan akuntansi dan sertifikasi CPA dalam meningkatkan profesionalisme akuntan.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Pengertian Isu Kontemporer Akuntansi

Isu kontemporer akuntansi adalah permasalahan, tren, atau topik terkini yang sedang berkembang dan memengaruhi praktik, teori, serta kebijakan akuntansi di tingkat nasional maupun internasional. Isu-isu ini muncul sebagai respons terhadap perubahan lingkungan bisnis, perkembangan teknologi, globalisasi, serta tuntutan transparansi dan akuntabilitas yang semakin tinggi dalam pelaporan keuangan.

Secara umum, isu kontemporer akuntansi mencakup tantangan dan inovasi terbaru yang dihadapi profesi akuntansi, seperti penerapan standar akuntansi internasional (IFRS), akuntansi lingkungan (green accounting), akuntansi syariah, pelaporan keberlanjutan (sustainability reporting), akuntansi berbasis teknologi digital, hingga etika dan tanggung jawab sosial akuntan.

Dengan kata lain, isu kontemporer akuntansi berfungsi untuk menyesuaikan praktik akuntansi dengan dinamika ekonomi dan sosial yang berubah cepat, agar laporan keuangan tetap relevan, andal, dan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan yang tepat oleh berbagai pihak.

2.2 Isu Kontemporer dalam Akuntansi

Isu kontemporer dalam akuntansi adalah berbagai permasalahan, tren, dan perkembangan terbaru yang sedang dihadapi dunia akuntansi akibat perubahan teknologi, ekonomi, sosial, dan lingkungan. Isu-isu ini mendorong profesi akuntan untuk terus beradaptasi agar tetap relevan dengan kebutuhan zaman.

Beberapa contoh isu kontemporer dalam akuntansi antara lain:

1. Penerapan Standar Akuntansi Internasional (IFRS).

Globalisasi menuntut keseragaman laporan keuangan antarnegara. Implementasi IFRS menjadi isu penting karena menuntut perusahaan menyesuaikan sistem pelaporan agar lebih transparan dan dapat dibandingkan secara global.

2. Sustainability Reporting (Pelaporan Keberlanjutan)

Perusahaan kini tidak hanya melaporkan kinerja keuangan, tetapi juga aspek sosial dan lingkungan. Isu ini muncul karena meningkatnya kesadaran terhadap tanggung jawab sosial perusahaan dan dampak lingkungan.

3. Akuntansi Lingkungan (Green Accounting)

Berkaitan dengan pencatatan dan pelaporan biaya serta manfaat aktivitas perusahaan terhadap lingkungan, seperti pengelolaan limbah atau konservasi sumber daya alam.

4. Digitalisasi dan Teknologi Akuntansi

Perkembangan teknologi seperti Artificial Intelligence (AI), Big Data, Blockchain, dan Cloud Accounting mengubah cara akuntansi dilakukan, termasuk otomatisasi pencatatan dan analisis data keuangan.

5. Etika Profesi dan Integritas Akuntan

Kasus manipulasi laporan keuangan menjadikan etika profesi sebagai isu penting. Akuntan dituntut menjaga integritas, objektivitas, dan kejujuran dalam penyusunan laporan.

6. Akuntansi Syariah

Pertumbuhan ekonomi syariah menimbulkan kebutuhan terhadap sistem akuntansi yang sesuai dengan prinsip Islam, seperti larangan riba dan keadilan dalam transaksi.

7. Akuntansi Pajak dan Regulasi Baru

Perubahan kebijakan perpajakan, baik nasional maupun internasional, menimbulkan tantangan bagi akuntan dalam menyesuaikan pencatatan dan pelaporan keuangan.

Secara keseluruhan, isu kontemporer dalam akuntansi menandakan bahwa profesi ini terus berkembang mengikuti perubahan zaman, dengan tujuan menjaga relevansi, transparansi, dan keandalan informasi keuangan di era modern.

2.3 Pelaporan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Serta Pelaporan Berkelanjutan (Sustainability Reporting)

1. Konsep *Corporate Social Responsibility & Sustainability Reporting*

Penggunaan istilah Tanggungjawab Sosial Perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) akhir-akhir ini semakin populer dengan semakin meningkatnya praktek tanggung jawab sosial perusahaan, dan diskusi-diskusi global, regional dan nasional tentang CSR. Istilah CSR yang mulai dikenal sejak tahun 1970-an, saat ini menjadi salah satu bentuk inovasi bagi hubungan perusahaan dengan masyarakat dan konsumen. CSR kini banyak diterapkan baik oleh perusahaan multi-nasional maupun perusahaan nasional atau lokal.

Tanggung jawab sosial perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) dapat didefinisikan sebagai bentuk kepedulian perusahaan terhadap lingkungan eksternal perusahaan melalui berbagai kegiatan yang dilakukan dalam rangka penjagaan lingkungan, norma masyarakat, partisipasi pembangunan, serta berbagai bentuk tanggung jawab sosial lainnya. Selain definisi di atas masih ada definisi lain mengenai CSR yakni Komitmen perusahaan dalam pengembangan ekonomi yang berkesinambungan dalam kaitannya dengan karyawan beserta keluarganya, masyarakat sekitar dan masyarakat luas pada umumnya, dengan tujuan peningkatan kualitas hidup mereka (WBCSD, 2002). Sedangkan Commission of The European Communities (2001) mendefinisikan CSR sebagai aktivitas yang berhubungan dengan kebijakan perusahaan untuk mengintegrasikan penekanan pada bidang sosial dan lingkungan dalam operasi bisnis mereka dan interaksi dengan stakeholder.

CSR merupakan nilai dan standar yang berkaitan dengan beroperasinya sebuah perusahaan dalam suatu masyarakat. CSR dapat diartikan sebagai komitmen usaha untuk beroperasi secara legal dari etis yang berkontribusi pada peningkatan kualitas kehidupan karyawan dan keluarganya, komunitas lokal dan berakar dan etika dan prinsip-prinsip yang berlaku di Perusahaan dan masyarakat. Enka yang dianut merupakan bagian dari budaya (corporate culture); dan etika yang dianut masyarakat merupakan bagian dari budaya masyarakat. Prinsip-prinsip atau azas yang berlaku di masyarakat juga termasuk berbagai peraturan dan regulasi pemerintah sebagai bagian dan sistem ketatanegaraan.

Dari sudut pandang strategis, suatu perusahaan bisnis perlu mempertimbangkan tanggung jawab sosialnya bagi masyarakat dimana bisnis menjadi bagiannya. Ketika bisnis mulai mengabaikan tanggung jawabnya. Masyarakat cenderung menanggapi melalui pemerintah untuk membatasi otonomi bisnis. Carroll menyatakan bahwa manajer organisasi bisnis memiliki empat tanggung jawab yakni :

1. Tanggung jawab ekonomi yakni memproduksi barang dan jasa yang bernilai bagi masyarakat.
2. Tanggung jawab hukum yakni perusahaan diharapkan mentaati hukum yang ditentukan oleh pemerintah.
3. Tanggung jawab etika yakni perusahaan diharapkan dapat mengkonstruksi keyakinan umum mengenai bagaimana orang harus bertindak dalam suatu masyarakat.
4. Tanggung jawab kebebasan memilih yakni tanggung jawab yang diasumsikan bersifat sukarela.

Dan keempat tanggung jawab tersebut, tanggung jawab ekonomi dan hukum dimulai sebagai tanggung jawab dasar yang harus dimiliki perusahaan. Setelah tanggung jawab dasar terpenuhi maka perusahaan dapat memenuhi tanggung jawab sosialnya yakni dalam hal etika dan kebebasan memilih. Namun demikian, kesadaran pelaporan CSR di Indonesia di tahun 2007-2008 masih rendah, hal ini terjadi karena adanya kondisi infrastruktur yang tidak mencukupi untuk mendukung pelaporan CSR (Utama, 2008).

Meskipun pelaporan CSR di Indonesia masih tergolong rendah, namun telah muncul peningkatan kekhawatiran pihak sosial (hngkungan) dan perusahaan itu sendiri tentang CSR yang membuat kebutuhan akan laporan CSR menjadi semakin meningkat. Hingga saat belum drankan format yang dapat digunakan sebagai standar umus pelaporan CSR. Salah satu standar yang dikemukakan adalah Sotainability Reporang yang dikembangkan oleh GRI (*Global Reporting Initiative*).

Global Reporting Initiative (GRI) telah mengeluarkan panduan/pedoman yang dapat digunakan untuk mengukur praktik astanaibility management berupa GRI Sustainability Reporting Guidelines dengan menunjukkan beberapa elemen penting yang berhubungan dengan 3 aspek yartu ekonomi, lingkungan dan manusia atau tople bottom Ime (Profit, Planet & People), GRI tokus pada pengungkapan standar beragam lingkungan ekonomi, sosial dan bisnis. Terdapat 3 level GRI, yaitu level terendah (level C) yang hanya melaporkan bagian dars keseluruhan standar pengungkapan GRI, hingga level tertinggi (Level A) yang melaporkan keseluruhan standar pengungkapan GRI. GRI mensyaratkan faporan tersebut harus diaudit oleh pihak ketiga yang idependen.

Konsep Sustainable development merupakan suatu konsep pembangunan dumana untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia saat ini (current) tidak boleh mengganggu kemampuan generasi berikutnya (next generation) dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka yang akan datang. Berdasarkan konsep tersebut, maka muncul konsep Sustainability management. Beberapa manfaat yang dapat diambil perusahaan dari implementasi sustainability management, yaitu:

1. Perusahaan lebih peduli terhadap masyarakat dan lingkungan selatar dalam pembangunan komunitas (community development) atau Corporate Social Responsibility (CSR). Perusahaan bukan hanya mengejar keuntungan bagi pemilik semata, namun juga harus menjaga dan memberi nilai tambah (value added) pada masyarakat dan lingkungannya.
2. Meningkatkan nama baik reputasi perusahaan, sehingga terjaga citra (image) yang positif.

3. Mengurangi dampak risiko yang merugikan perusahaan.
4. Meningkatkan daya saing perusahaan (competitive advantage).
5. Meningkatkan kepercayaan para pemegang saham dan pemangku kepentingan (stakeholder) lainnya.
6. Bahan Analisis investasi bagi para investor (Socially Responsible Investment/SRI).

Pertanggungjawaban Sosial Perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) adalah mekanisme bagi suatu organisasi untuk secara sukarela mengintegrasikan perhatian terhadap lingkungan dan sosial ke dalam operasinya dan interaksinya dengan stakeholders, yang melebihi tanggung jawab organisasi di bidang hukum (Darwin, 2004).

Menurut Pearce dan Robinson (2008:72) tanggung jawab sosial terdiri atas :

- a) Tanggung jawab ekonomi (economic responsibilities) yang dimana tugas manajer sebagai agen dan pemilik perusahaan, untuk memaksimalkan kekayaan pemegang saham.
- b) Tanggung jawab hukum (legal responsibilities) mencerminkan kewajiban perusahaan mematuhi undang-undang yang mengatur aktivitas bisnis.
- c) Tanggung jawab etika (ethical responsibilities) mencerminkan gagasan perusahaan mengenai perilaku bisnis yang benar dan layak.
- d) Tanggung jawab diskrest (discretionary responsibilities) merupakan tanggung jawab yang secara sukarela diambil oleh suatu bisnis yang mencakup hubungan masyarakat, kewargaan yang baik, dan tanggung jawab sosial perusahaan secara penuh.

Sustainability Reporting merupakan pelaporan yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengukur, mengungkapkan (disclose), serta upaya perusahaan untuk menjadi perusahaan yang akuntabel bagi seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) untuk tujuan kinerja perusahaan menuju konteks pembangunan yang berkelanjutan

(sustainability development). Proses penyapan Sustainability Reporting dilakukan melalui 5 (lima) mekanisme, yaitu :

1. Penyusunan kebijakan perusahaan. Dalam hal ini, perusahaan membuat kebijakan yang berkaitan dengan sustainability development, kemudian mempublikasikan kebijakan tersebut beserta dampaknya,
2. Tekanan pada rantai pemasok (supply chain). Harapan masyarakat pada perusahaan untuk memberikan produk dan jasa yang ramah lingkungan juga memberikan tekanan pada perusahaan untuk menetapkan standar kinerja dan sustainability reporting kepada para pemasok dan mata rantainya.
3. Keterlibatan *stakeholders*.
4. Voluntary codes. Dalam mekanisme ini, masyarakat meminta perusahaan untuk mengembangkan aspek aspek kinerja sustainability dan meminta perusahaan untuk membuat laporan pelaksanaan sustainability. Apabila perusahaan belum melaksanakan, maka perusahaan harus memberikan penjelasan.
5. Mekanisme lain adalah rating dan benchmarking, pajak dan subsidi, izin yang dapat dipendagangkan, serta kewajiban dan larangan.

1. Lintas Peristiwa

National Center for Sustainability Reporting (NCSR) kembali menggelar acara malam penghargaan “Indonesia Sustainability Reporting Award (ISRA) 2012 di Hotel Mulia Senin (3/12/2012). Acara yang diselenggarakan untuk ke-8 kalinya ini memberikan penghargaan kepada perusahaan-perusahaan yang telah mengembangkan Laporan Keberlanjutan. Tahun ini ajang lomba ISRA 2012 diikuti oleh 29 perusahaan dan PT Aneka Tambang (Persero) Tbk berhasil menjadi juara umum dalam ajang ini dengan meraih “Best Sustainability Report 2011 Overall yang berarti mempunyai laporan terbaik di Indonesia dalam segi pengungkapan dan tampilan. Aneka Tambang juga meraih “Best Website 2011” sebagai penghargaan atas kelengkapan informasi lingkungan dan sosial yang disajikan dalam website dalam mempromosikan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*).

Sustainability Reporting (Laporan Keberlanjutan) atau juga sering dikenal dengan “Laporan CSR” adalah laporan yang memuat kinerja perusahaan dalam tiga aspek yaitu Ekonomi, Lingkungan dan Sosial. “Laporan ini menjadi sarana bagi para pemangku kepentingan (stakeholder) untuk menilai sejauh mana perusahaan mengatasi isu keberlanjutan seperti penghematan dan konservasi energi, pengelolaan air, pengelolaan limbah, mengatasi pencemaran udara serta tsu sosial seperti partisipasi perusahaan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat setempat.

Sejak dimulainya ISRA di tahun 2005, telah mendorong kesadaran perusahaan akan pentingnya laporan keberlanjutan. Ketua Tim Juri ISRA 2012. Sarwona Kusumaatmadja mengatakan “Kami sangat gembira karena anano perusahaan untuk membuat laporan keberlanjutan atau laporan CSR semakin meningkat dari tahun ke tahun. Kami terus mendorong perusahaan-perumahan lainnya untuk melakukan langkah yang sama sehngat bentuk perlangging Jawabannya kepada publik”.

Jika tahun 2005 tercatat hanya satu perusahaan yang membuat laporan keberlanjutan, maka tahun 2012 ini, sudah ada 40 perusahaan di Indonesia yang membuat laporan keberlanjutan sebagai sarana komunikasi kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungannya kepada publik. Hingga kini, perusahaan-perusahaan yang telah mengembangkan Laporan Keberlanjutan, 70% berasal dari perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan 30% adalah swasta.

Pada tahun 2012 im, ISRA dibagi menjadi dua kelompok yatu “Kelompok A” yang terdiri dari perusahaan yang telah membuat laporan lebih dari 3 tahun dan “Kelompok B” yang berisi perusahaan dengan laporan kurang dari tiga tahun. Masing-masing kelompok dibagi menjadi beberapa kategori yaitu Kategori Jasa, Sumber Daya Alam dan Manufaktur.

Selain PT Aneka Tambang (Persero) Tbk yang meraih juara umum, maka dari Kelompok A, PT Kaltim Prima Coal yang meraih Best Sustainability Report 2011

untuk kategori Sumber Daya Alam, PT Astra Internasional, Tbk meraih Best Sustainability Report 2011 untuk kategori Manufaktur dan PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk meraih Best Sustainability Report 2011 untuk sektor Jasa. Runner Up dan tiap-tiap kategori pada kelompok A adalah PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero), Tbk untuk kategori Sumber Daya Alam, PT Holum Indonesia, Tbk untuk Kategori Manufaktur serta PT Perusahaan Gas Negara, Tbk untuk kategori Jasa.

Sementara di Kelompok B yang tampil sebagai peraih Best Sustainability Report 2011 adalah PT Pertamina Geothermal Energy untuk kategori Sumber Daya Alam, PT Unilever Indonesia, Tbk untuk kategori Manufaktur, serta PT Bakreland Development, Tbk untuk kategori Jasa. Sedangkan Runner Up pada Kelompok B adalah PT Perkebunan Nusantara XIII (Persero) untuk kategori Sumber Daya Alam, PT Indonesia Power untuk kategori Manufaktur serta PT Indika Energy. Tbk untuk kategori Jasa.

Selain juara umum pada ISRA 2012, PT Aneka Tambang (Persero) Tbk ternyata juga mendapatkan penghargaan lainnya di tahun yang sama. PT Aneka Tambang (Persero) Tbk memborong sekaligus enam penghargaan Indonesian Quality Award (IQA) dan Anugerah Business Review (ABR) 2012. Penghargaan IQA 2012 diterima langsung oleh Direktur Operasi ANTAM, Winardi, pada 21 November 2012, di Hotel Mulia Senayan, Jakarta. Dari 26 perusahaan yang ikut serta dalam IQA 2012, ANTAM meraih dua penghargaan Good Performance dan Bronze Achievement Award dalam assessment pencapaian tingkat kinerja. Penghargaan Good Performance merupakan klasifikasi penilaian kinerja perusahaan, berdasarkan total skor hasil assessment perusahaan secara keseluruhan. Sedangkan Bronze Achievement Award merupakan pemerangkatan berdasarkan ungkapan pencapaian skor dibandingkan tahun sebelumnya. Untuk meraih kedua penghargaan tersebut, ANTAM telah melalui berbagai tahapan sesuai berdasarkan kriteria-kriteria yang meliputi *Leadership, Strategic Measurement, Planning Focus Customer Management dan Business Outcome*.

IQA diselenggarakan oleh 104 Foundation yang setiap tahun memberikan penghargaan kepada perusahaan yang telah menerapkan Kriteria Kinerja Ekselen Malcolm Baldrige. Sementara penghargaan ABR 2012 diterima oleh Direktur Sumber Daya Manusia (SDM) ANTM, Achmad Ardranto, di The Ritz Carlton Hotel, Jakarta pada 21 November 2012.

Anugerah Business Review (ABR) melakukan penilaian terhadap 53 perusahaan yang terseleksi. Penilaian dilakukan melalui input dari beberapa tahapan survei independen terhadap khalayak umum dan stakeholder internal perusahaan, pengisian kuesioner, dan pemaparan presentasi oleh kandidat perusahaan sebagai bahan penilaian. ABR merupakan ajang tahunan yang diselenggarakan oleh Majalah Business Review, yang melakukan penilaian kepada perusahaan-perusahaan dan CEO-CEO terkemuka di Indonesia, baik BUMN, swasta nasional maupun multinasional, yang berhasil meningkatkan kinerja atau menciptakan pertumbuhan.

Keberhasilan PT Aneka Tambang (Persero) Tbk meraih berbagai penghargaan di tahun yang sama memperlihatkan adanya kesinambungan Laporan Keberlanjutan (Sustainability Reporting) dengan kinerja perusahaan. Penyapan kinerja lingkungan dan sosial yang terintegrasi dengan kinerja finansial dalam laporan tahunan (Integrated Reporting) menjadi suatu bukti otentik bahwa Tanggungjawab Sosial Perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) tidak dapat dipisahkan dari upaya-upaya peningkatan kinerja perusahaan.

2.4 Dampak UU Akuntan Publik Terhadap Perkembangan Profesi

Undang-Undang No. 5 tahun 2011 tentang Akuntan Publik disahkan di Jakarta pada tanggal 3 Mei 2011. Secara garis besar Undang-Undang ini mendefinisikan tentang peran seorang akuntan publik di dalam lingkungan masyarakat yang terdiri dari tugas, hak, kewajiban, tanggung jawab, sanksi dan lain sebagainya dari seorang

akuntan publik maupun KAP yang bertujuan untuk lebih mensosialisasikan kepada masyarakat akan pentingnya penggunaan jasa akuntan dalam prakteknya di lingkungan masyarakat. Undang-Undang ini muncuil sebagai jawaban atas kebutuhan masyarakat yang mulai menuntut kredibilitas, integritas dan profesionalisme dari seorang akuntan publik.

Akuntan publik merupakan profesi yang muncul dan adanya tuntutan publik akan adanya mekanisme komunikasi yang independen antara entitas ekonomi dengan para stakeholder terutama yang berkaitan dengan akuntabilitas dari suatu entitas yang bersangkutan. Dibutuhkan adanya peningkatan standar mutu dari profesionalisme seorang akuntan publik, seperti yang dijabarkan pada pasal 1 UU akuntan publik pasal 2 “standar profesional akuntan publik, yang selanjutnya disingkat SPAP, adalah acuan yang ditetapkan menjadi ukuran mutu yang wajib dipatuhi oleh akuntan publik dalam pemberian jasanya”.

Terdapat beberapa pasal dalam UU no 5 tahun 2011 yang dikhawatirkan akan berpengaruh terhadap perkembangan profesi Akuntan Publik di Indonesia Hal tersebut adalah:

1. Sanksi Pidana Bagi Akuntan Publik,
2. Penjinan Akuntan Publik Asing,
3. Persyaratan Akuntan Publik

Pertama, sanksi pidana dikhawatirkan akan semakin mengurangi minat generasi muda untuk terjun menjadi Akuntan publik yang saat ini sudah sangat rendah, sanksi administratif kiranya sudah cukup memadai. Kedua, penjinan Akuntan Publik Asing yang dirasa begitu mudah, akan menggusur keberadaan Akuntan Publik lokal. Hal ini dimungkinkan karena jumlah Akuntan Publik di beberapa negara ASEAN sangat banyak, sehingga mereka akan melakukan ekspansi ke Indonesia, disamping itu adanya potensi ancaman terhadap kepentingan keamanan negara ketika Akuntan Publik Asing tersebut memeriksa industri strategis negara. Ketiga, persyaratan untuk menjadi Akuntan Publik begitu mudah, karena tidak mensyaratkan harus dan

jurusan akuntansi, hal ini menjadi preseden buruk bagi pengembangan jurusan akuntansi di Indonesia.

1. Sanksi Pidana Terhadap Akuntan Publik

Pada UU No. 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik, telah diatur Ketentuan Pidana terhadap kegiatan akuntan publik pada pasal 55, 56 dan 57. Namun terdapat hal-hal tertentu yang cenderung menimbulkan ketidak nyamanan dalam menjalani protest akuntan publik ini. Pada pasal 55 huruf b yang menyatakan *“dengan sengaja melakukan manipulasi, memalsukan, dan/atri menghilangkan data atau catatan pada kertas kerja atau tidak membuat kertas kerja yang berkaitan dengan jasa yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) sehingga tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya dalam rangka pemeriksaan oleh pihak yang berwenang....”*.

Perbuatan-perbuatan terkait hal diatas telah diatur dalam KUHP, sehingga akan berdampak munculnya duplikasi aturan, tumpang tindih, dan berpotensi menimbulkan perbedaan interpretasi atas suatu permasalahan sehingga menimbulkan ketidakpastian. Serta dapat dilihat memberikan celah bagi pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab untuk mempidanakan akuntan publik karena kata-kata *“sehingga tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya begitu bias dan tidak memiliki ukuran bagaimana suatu kondisi laporan itu dapat tidak dapat digunakan semestinya oleh pihak berwenang, karena diketahui bahwa jasa produk dari pekerjaan akuntan publik adalah suatu opini atau pendapat akuntan publik terhadap suatu laporan keuangan atau informasi keuangan dimana opini tersebut merupakan suatu bentuk keyakinan memadai (reasonable assurance) dan bukan merupakan suatu pernyataan kebenaran absolut (mutlak) atas laporan keuangan atau informasi keuangan lainnya. Produk akuntan publik tersebut bukan akta otentik sebagaimana dikeluarkan oleh pejabat publik. Dan juga terdapat beberapa alasan lain, yaitu:*

1. Bahwa standar profesi akuntan publik adalah suatu acuan yang digunakan dalam menjalankan protesnya dimana dalam pelaksanaannya banyak menggunakan professional judgement dan berbasis sampling, oleh karena itu

pengaturannya berbeda dengan ketentuan hukum yang sifatnya pasti dan tidak menimbulkan keragu-keraguan

2. Bahwa seorang akuntan publik bukanlah kuasi Negara, kuasi Pemerintah, atau pejabat publik yang diberikan kewenangan atas nama publik atau Negara sehingga produk akuntan publik bukan merupakan legal binding sehingga tidak sebanding apabila dikenakan sanksi pidana.
3. Bahwa standar profesi dan kode etik yang digunakan oleh akuntan publik adalah bukan merupakan produk hukum yang termasuk dalam jenis dan hirarki perundang-undangan karena standar profesi dan kode etik ditetapkan oleh asosiasi profesi.

Selain alasan tersebut, penerapan sanksi pidana atas pekerjaan akuntan publik juga akan menimbulkan dampak meningkatnya risiko profesi dan bisnis akuntan publik sehingga akan mengurangi minat dan tidak mendorong pertumbuhan profesi akuntan publik yang sudah sangat rendah.

Jumlah akuntan di Indonesia pun ternyata tak sebanyak yang dibayangkan. Pemerintah bahkan mengklaim kuantitas akuntan di Tanah Air masih lebih sedikit ketimbang negara tetangga, seperti Malaysia. Padahal, jumlah perusahaan baik nasional dan asing di Tanah Air kian menjamur (SWA.co.id. November 2012). Indonesia saat ini membutuhkan minimal 200 ribu orang-orang berprofesi sebagai akuntan publik untuk mendukung kinerja perekonomian nasional (Metrotvnews. Com, Juni 2013).

2. Perjanjian Akuntan Publik Asing

Menghadapi MEA (Masyarakat Ekonomi Asean) dan Pasar bebas AFTA pada tahun 2015 mendatang, para akuntan publik di Indonesia secara tidak langsung harus mengikuti standar laporan keuangan IFRS. International Accounting Standards, yang lebih dikenal sebagai International Financial Reporting Standards (IFRS), merupakan standar tunggal pelaporan akuntansi yang membenarkan penekanan pada penilaian (revaluation) profesional dengan disclosures yang jelas dan transparan mengenai substansi ekonomis transaksi. Penjelasan hingga

mencapai kesimpulan tertentu. Standar ini muncul akibat tuntutan globalisasi yang mengharuskan para pelaku bisnis di suatu Negara ikut serta dalam bisnis lintas negara. Untuk itu diperlukan standar internasional yang berlaku sama di semua Negara untuk memudahkan proses rekonsiliasi bisnis.

Di sisi lain, Undang-Undang No.5 Tentang Akuntan Publik memang sudah nyata-nyata memberikan lampu hijau bagi akuntan asing untuk berkiprah di kancan nasional. Secara tidak langsung, kondisi seperti ini bisa membuat akuntan Indonesia kehilangan pangsa pasar karena perusahaan-perusahaan di Indonesia tentunya akan lebih memilih untuk merekrut akuntan asing yang sudah lebih dulu paham tentang standard IFRS.

Berikut adalah pasal-pasal pada UU No. 5 Tahun 2011 yang mendukung perizinan akuntan publik asing untuk bekerja di Indonesia:

Pasal 1

- 1) Akuntan Publik adalah seseorang yang telah memperoleh tzn untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- 2) Akuntan Publik Asing adalah warga negara asing yang telah memperoleh izin berdasarkan hukum di negara yang bersangkutan untuk memberikan jasa sekurang-kurangnya jasa audit atas informasi keuangan historis.

Pasal 7

- 1) Akuntan Publik Asing dapat mengajukan permohonan izin Akuntan Publik kepada Menteri apabila telah ada perjanjian saling pengakuan antara Pemerintah Indonesia dan pementah negara dari Akuntan Publik Asing tersebut.

- 2) Untuk mendapatkan izin Akuntan Publik, Akuntan Publik Asing harus memenuhi syarat sebagai berikut (a-1)
- 3) Akuntan Publik Asing yang telah memiliki izin Akuntan Publik tunduk pada Undang-Undang ini.
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara permohonan izin Akuntan Publik Asing menjadi Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 17

- 1) KAP yang mempekerjakan tenaga kerja profesional asing harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan
- 2) Komposisi tenaga kerja profesional asing yang dipekerjakan pada KAP paling banyak 1/10 (satu per sepuluh) dari seluruh tenaga kerja profesional untuk masing-masing tingkat jabatan pada KAP yang bersangkutan.

Berdasarkan Pasal-Pasal di atas jelas sekali bahwa peraturan di Indonesia membuka ruang bagi akuntan publik asing untuk memperoleh izin untuk menjual jasa audit, di Indonesia dan akan menyebabkan persaingan yang lebih luas serta sulit bagi akuntan publik dalam negeri. Secara tidak langsung, kondisi seperti ini bisa membuat akuntan Indonesia kehilangan pangsa pasar karena perusahaan-perusahaan di Indonesia tentunya akan lebih memilih untuk merekrut akuntan asing yang sudah lebih dulu paham tentang standar IFRS. Semenjak digantikannya PSAK dengan IFRS di Indonesia, para akuntan publik harus menyesuaikan kinerjanya dengan IFRS dikarenakan akuntan publik berperan penting dalam dunia usaha. Akuntan publik dituntut untuk menyajikan laporan keuangan dengan kualitas yang tinggi. Mengingat tujuan IFRS adalah memastikan bahwa laporan keuangan interim perusahaan untuk periode-periode yang dimasukkan dalam laporan keuangan tahunan, mengandung informasi berkualitas tinggi yang:

1. Transparansi bagi para pengguna dan dapat dibandingkan sepanjang periode yang disajikan
2. Menyediakan titik awal yang memadai untuk akuntansi yang berdasarkan pada IFRS
3. Dapat dihasilkan dengan biaya yang tidak melebihi manfaat untuk para pengguna

IFRS merupakan sistem penyajian laporan keuangan yang telah digunakan di sebagian besar negara di dunia dan telah menjadi acuan dalam kegiatan akuntansi internasional. Dalam era globalisasi seperti sekarang ini, perusahaan-perusahaan besar maupun kecil membutuhkan akuntan publik untuk memeriksa laporan keuangan perusahaan sehingga menghasilkan informasi yang berkualitas tinggi untuk mengambil keputusan. Dengan demikian, akuntan publik harus meningkatkan kinerja dan profesionalisme dalam menghadapi konvergensi IFRS sehingga dapat memenuhi kebutuhan para pengguna jasa akuntan publik dan menjaga kepercayaan yang diberikan pengguna jasa akuntan publik tersebut.

Dukungan dari semua pihak agar proses konvergensi PSAK ke IFRS ini dapat berjalan dengan baik tentunya sangat diharapkan. Apalagi Undang-Undang No.5 Tentang Akuntan Publik memang sudah nyata-nyata memberikan lampu hijau bagi akuntan asing untuk berkiprah di kancah nasional. Secara tidak langsung, kompetisi tersebut bisa membuat akuntan Indonesia kehilangan pangsa pasar karena perusahaan-perusahaan di Indonesia memilih untuk merekrut akuntan asing. Maka dari itu Akuntan Publik diharapkan dapat segera mengupdate pengetahuannya sehubungan dengan perubahan SAK, mengupdate SPAP dan menyesuaikan pendekatan audit yang berbasis IFRS.

Akuntan Manajerial/ Perusahaan dapat mengantisipasi dengan segera membentuk tim sukses konvergensi IFRS yang bertugas mengupdate pengetahuan Akuntan Manajerial, melakukan gap analysis dan menyusun road map konvergensi IFRS serta berkoordinasi dengan proyek lainnya untuk optimalisasi

sumber daya. Hanya hal dalam IFRS yang akan diadopsi berbeda dengan prinsip yang saat ini berlaku. Beberapa hal antara lain:

1. Penggunaan *Fair-value Rasis* dalam penilaian aktiva, baik aktiva tetap, sahan, obligasi dan lain-lain, sementara sampai dengan saat ini penggunaan harga perolehan masih menjadi burac mind akuntansi Indonesia. Sayangnya IFRS sendiri belum memiliki definisi dan petunjuk yang jelas dan seragam tentang pengukuran berdasarkan nilai wajar ini.

Jenis laporan keuangan berdasarkan PSAK terdin dan 5 elemen (Neraca, Rugs-Laba dan Perubahan Ekustas, Cashflow, dan Catatan atas Laporan keuangan). Dalam draft usulan IFRS menjadi 6 elemen (Neraca, Rugi-Laba Komprehensif, Perubahan Ekurtas, Cashflow, Catatan atas Laporan keuangan, dan Neraca Komparatif). Penyajian Neraca dalam IFRS tidak lagi didasarkan pada susunan Aktiva, Kewajiban dan Ekuitas, tapi dengan urutan Aktiva dan Kewajiban usaha, Investasi, Pendanaan, Perpajakan dan Ekuitas. Laporan Cashflow tidak disajikan berdasarkan kegiatan Operasional, Investasi dan Pendanaan, melainkan berdasarkan Cashflow Usaha (Operasional dan investasi), Cashflow perpajakan dan Cashflow penghentian usaha

2. Perpajakan, terutama terkait pajak atas koreksi laba-rugi atas penerapan IFRS maupun atas revaluasi aktiva berdasarkan fair-value bayis.

3.Persyaratan Akuntan Publik

Pada pasal 6 huruf a UU No. 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik, bahwa Proses menjadi Akuntan Publik disederhanakan dan basis calon Akuntan Publik diperluas. Dengan ketentuan tersebut berarti gelar CPA (certified public accountant) dapat diberikan kepada siapa saja yang lulus ujian CPA tanpa memandang dia lulusan jurusan apapun (tidak harus dari junisan akuntansi).

Seorang dokter, insinyur, psikolog, atau apapun latar belakang kesarjanaannya, dibolehkan untuk ikut ujian CPA yang tentunya bila berhasil akan mendapat gelat Certified Public Accountant (CPA), dan tidak harus lulus PPAk terlebih dahulu.

Hal ini memunculkan potensi menurunnya kualitas dari SDM yang ahis dalam akuntansi, Padahal seseorang yang mengambil S-1 untuk jurusan akuntanas saja paling tidak membutuhkan 4 tahun untuk mendalami akuntansi tersebut. Suht membayangkan seseorang dari jurusan bukan akuntansi dapat menjadi seorang akuntan hanya dengan cara lulus ujian CPA. Menurut Prof. Dr. Muslich Anshort (Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga), seharusnya Undang-Undang harus dapat mengakomodir bagaimana protes akuntansi ini bisa menarik minat para sarjana akuntansi untuk terjun menekuninya. Walaupun diketahui bahwa jumlah akuntan publik di Indonesia sangat kecil dibandingkan Negara-negara ASEAN.

Setelah disahkannya UU no 5 Tahun 2001 ini banyak sekali pro dan kontra. Hal ini dikarenakan banyak sekali terdapat pasal pasal yang mematikan profesa akuntan publik di Indonesia. Dimana di dalam undang-undang memuat pasal pasal yang membuka kesempatan masuknya akuntan asing yang akan dengan mudah menggali dan mengambil data data perekonomian dan rahasia negara sehingga berpotensi merugikan perekonomian dan membahayakan keamanan negara. Di sisi lain, tendapat nilar positif dimana para ausator telah cukup lama menantikan adanya payung hukum tertinggi untuk mengatur dan melindungi profest auditor swasta ini.

Salah satu jalan yang dapat ditempuh oleh Permerintah adalah dengan meningkatkan kualitas akuntan di Indonesia. Saat in panenntah sudah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 84 tahun 2012 tentang Komite Profess Akuntan Publik yang sudah ditandatangani 15 Oktober 2012 lalu. Regulasi mi sebagai aturan turunan sebagai amanat UU No. 5 tahun 2011 tentang Akuntan Publik. “PP itu menugaskan Menteri Keuangan untuk membentuk Komite Etik Profesi Akuntan. Pembentukan komite ini bertujuan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pembinaan, peberdayaan, dan pengawasan terhadap profesi akuntan publik dalam melindungi masyarakat,” kata Wamenkeu (taiglobal.or.id, Maret 2013).

Untuk memperkuat kompetensi anggotanya, pada HUT IAI tahun 2013 ini IAI juga meluncurkan gelar Chartered Accountant kepada anggota utamanya. Gelar CA atau chartered accountant akan dianugerahkan kepada anggota utama IAI. Pemegang gelar ini akan wajib mengikuti kegiatan Pendidikan Profesional Berkelanjutan (PPL) yang diselenggarakan oleh IAI atau badan-badan lain yang disetujui. Hal ini untuk memastikan akuntan anggota IAI senantiasa meningkatkan kompetensinya.

2.5 Pendidikan Akuntansi dan Gelar CPA Di Indonesia

Tuntutan kualitas pendidikan akuntansi menjadi semakin besar seiring keanggotaan IAI dalam International Federation of Accountants (IFAC). Hal ini diwujudkan dengan salah satu program kerja IAI yaitu peningkatan peran IAI dalam pendidikan akuntansi nasional. Standar pendidikan yang dikeluarkan IFAC menjadi panduan bagi seluruh stakeholder yang terkait yaitu: Asosiasi profesi, dunia pendidikan, dunia usaha dan industri serta pemerintah, untuk bersama-sama berinteraksi dalam membentuk seorang akuntan yang profesional.

1. Pendidikan Akuntansi

Aktivitas yang berkaitan dengan pendidikan akuntansi mempunyai beberapa sasaran, antara lain:

- 1) Tersusannya bine print pendidikan akuntansi meliputi seluruh jenjang pendidikan akuntansi
- 2) Masuknya Ujian Sertifikasi Akuntan Publik (USAP) & Ujian Sertifikasi Akuntan Manajemen (USAM) sebagai jenjang sertifikasi.
- 3) Meningkatnya jumlah penyelenggara dan mutu PPA
- 4) Perungkatan jumlah dan mutu penyelenggara pendidikan magster dan doktor akuntansi.
- 5) Peningkatan peran serta IAI dalam pengembangan pendidikan akuntansi khususnya menyangkut pencapaian standar kompetensi akuntansi pada semua jenjang Pendidikan

Dalam pengembangan blue print pendidikan akuntansi, beberapa isu sentral yang perlu dikaji adalah:

- 1) Munculnya Undang-Undang Akuntan Publik (UU-AP) dan diikuti dengan Undang-Undang Pelaporan Keuangan (saat sekarang masih merupakan perancangan draft RUU), Berkaitan dengan UU-AP, kompetensi akuntan yang dihasilkan oleh institusi pendidikan akuntansi akan semakin menjadi sorotan, terlebih pada sertifikasi profesi akuntan publik yang memungkinkan berasal dari lulusan program sarjana dan D IV bidang non akuntansi.
- 2) Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP, 2010) telah menyatakan perlunya suatu perombakan dalam pendidikan karena pergeseran kondisi lingkungan menuju techno-culture dan techno-science. Ini berarti perlunya pergeseran paradigma pendidikan akuntansi dalam memenuhi tuntutan global, baik yang bersumber dari nilai-nilai global universal maupun kebutuhan lokal yang bersumber dari nilai-nilai atau kearifan lokal.
- 3) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga sedang intensif menerapkan pendidikan karakter dalam semua jenjang pendidikan.

2. Certified Public Accountant (CPA) di Indonesia

Profesi akuntan adalah semua bidang pekerjaan yang mempergunakan keahlian di bidang akuntansi, termasuk bidang pekerjaan akuntan publik, akuntan intern yang bekerja pada perusahaan industri, keuangan atau dagang, akuntan yang bekerja di pemerintah, dan akuntan sebagai pendidik. Dalam arti sempit, profesi akuntan adalah lingkup pekerjaan yang dilakukan oleh akuntan sebagai akuntan publik yang lazimnya terdiri dari pekerjaan audit, akuntansi, pajak dan konsultan manajemen.

Akuntan publik adalah akuntan yang telah memperoleh izin dari menteri keuangan untuk membenkan jasa akuntan publik di Indonesia Ketentuan

mengenai akuntan publik di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2011 tentang Akuntan Publik dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2008 tentang Jasa Akuntan Publik. Setiap akuntan publik wajib menjadi anggota Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPTI), asosiasi profesi yang diakui oleh Pemerintah.

Dalam era globalisasi, dunia usaha dan masyarakat telah menjadi semakin kompleks sehingga menuntut adanya perkembangan berbagai disiplin ilmu termasuk akuntansi. Akuntansi memegang peranan penting dalam ekonomi dan sosial, karena setiap pengambilan keputusan yang bersifat keuangan harus berdasarkan informasi akuntansi. Keadaan ini menjadikan akuntan sebagai suatu profesi yang sangat dibutuhkan keberadaannya dalam lingkungan organisasi bisnis. Keahlian khusus seperti pengelolaan data bisnis menjadi informasi berbasis komputer, pemeriksaan keuangan maupun non keuangan, penguasaan materi perundang-undangan perpajakan adalah hal-hal yang dapat memberikan nilai lebih bagi profesi akuntan.

Seiring dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang diharapkan semakin baik, maka profesi akuntan sangat dibutuhkan dalam membantu mewujudkannya. Kondisi ini, membawa pada suatu konsekuensi bahwa masih terbuka lebar bagi setiap orang untuk memasuki profesi sebagai akuntan, dan profesi akuntan sebagai pilihan karir yang menjanjikan. Untuk dapat menjalankan profesinya sebagai akuntan publik di Indonesia, seorang akuntan harus lulus dalam ujian profesi yang dinamakan Ujian Sertifikasi Akuntan Publik (USAP) dan setelah lulus berhak memperoleh sebutan “CPA Indonesia” (sebelum tahun 2007 disebut “Bersertifikat Akuntan Publik” atau BAP). Sertifikat akan dikeluarkan oleh TAPI (Institut Akuntan Publik Indonesia). Sertifikat akuntan publik tersebut merupakan salah satu persyaratan utama untuk mendapatkan izin praktik sebagai akuntan publik dari Kementerian Keuangan.

Gelar CPA menyiratkan 2 nilai kualitas, dari seorang akuntan:

- 1) Kompetensi Seorang akuntan yang bergelar CPA sudah pasti memiliki kompetensi (pengetahuan, skill, dan kinerja) yang sudah teruji-melalu ujian standansasi yang dirancang sedemikian rupa-sehingga “layak” memperoleh gelar Certified Public Accountant (CPA).
- 2) Profesionalitas Seorang akuntan yang bergelar CPA, sudah pasti memiliki sikap, mental dan perilaku yang bisa dikategorikan sebagai seorang yang profesional. Alat takar profesionalitas seorang akuntan adalah kode etik protesi akuntan publik. Dengan kata lain, idealnya, seorang akuntan yang bergelar CPA menjunjung tinggi kode etik profesi akuntan publik.

Dua nilai kualitas tersebut melahirkan kepercayaan (trust), dari publik (terutama pengguna jasa), yang sangat dibutuhkan dalara menjalankan menjalankan profesi sebagai seorang akuntan.

2.6 Studi Kasus

Implementasi Sustainability Reporting pada PT Astra International Tbk

Isu kontemporer dalam akuntansi berkembang seiring dengan perubahan global, terutama terkait dengan kesadaran lingkungan, tanggung jawab sosial, dan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance). Salah satu isu yang menjadi fokus utama adalah pelaporan keberlanjutan atau sustainability reporting.

Sustainability reporting merupakan pelaporan yang mencakup tiga aspek utama yang dikenal sebagai Triple Bottom Line:

- Profit (Keuntungan ekonomi)
- People (Kesejahteraan sosial)
- Planet (Kelestarian lingkungan)

Dalam konteks ini, perusahaan tidak hanya dituntut untuk menyajikan laporan keuangan tradisional, tetapi juga harus melaporkan dampak sosial dan lingkungan

dari aktivitas bisnisnya. Hal ini menjadi tantangan besar bagi akuntan karena membutuhkan metode pengukuran dan pelaporan yang berbeda dari akuntansi konvensional.

PT Astra International Tbk, sebagai salah satu perusahaan terbesar di Indonesia, telah mulai menerapkan Sustainability Reporting berdasarkan pedoman Global Reporting Initiative (GRI Standards) sejak tahun 2017. Laporan tersebut disusun setiap tahun bersamaan dengan laporan tahunan perusahaan.

Pertanyaan Studi Kasus :

Dalam penerapan sustainability reporting, Astra menghadapi beberapa permasalahan berikut:

1. Bagaimana cara mengukur dampak lingkungan yang tidak dapat dihitungkan dengan angka keuangan?
2. Apakah pelaporan keberlanjutan benar-benar memberikan manfaat bagi investor dan masyarakat?
3. Bagaimana peran akuntan dalam memastikan laporan tersebut akurat, transparan, dan dapat dipercaya?

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Mempresentasikan isu kontemporer akuntansi merupakan kegiatan akademik dan profesional yang penting untuk meningkatkan pemahaman terhadap dinamika dan perkembangan terkini dalam dunia akuntansi. Isu-isu seperti sustainability reporting, integrated reporting, akuntansi hijau (green accounting), akuntansi syariah, serta digitalisasi akuntansi mencerminkan bagaimana profesi ini terus beradaptasi terhadap perubahan lingkungan bisnis dan tuntutan masyarakat.

Dalam penyajiannya, presentasi isu kontemporer akuntansi harus disusun secara sistematis — dimulai dari identifikasi masalah, analisis teori yang relevan, studi kasus aktual, hingga kesimpulan dan rekomendasi praktis. Hal ini bertujuan agar audiens tidak hanya memahami konsep, tetapi juga mampu menghubungkannya dengan praktik nyata di lapangan.

Dengan demikian, mempresentasikan isu kontemporer akuntansi bukan hanya sekadar kegiatan akademis, tetapi juga menjadi sarana untuk melatih kemampuan berpikir kritis, analitis, komunikatif, dan profesionalisme calon akuntan dalam menghadapi tantangan global di masa depan.

3.2 Saran

Agar presentasi isu kontemporer akuntansi lebih berkualitas, sebaiknya menggunakan referensi yang aktual dan terpercaya dari jurnal atau lembaga profesional seperti IAI dan IFAC. Materi juga perlu dikaitkan dengan praktik nyata melalui studi kasus agar lebih aplikatif. Gunakan media visual menarik seperti grafik atau video untuk memperjelas data. Selain itu, tingkatkan kemampuan komunikasi agar penyampaian lebih meyakinkan. Terakhir, tanamkan sikap kritis dan reflektif dengan menganalisis dampak isu terhadap etika profesi dan keberlanjutan bisnis.

DAFTAR PUSTAKA

- Belkaoui, A. R. 2015. *Accounting Theory (7th ed.)*. Boston: Cengage Learning.
- Gray, R., Owen, D., dan Adams, C. 2014. *Accounting for Sustainability: A Practical Guide to Measuring and Managing Social and Environmental Impact*. London: SAGE Publications.
- Hall, J. A. 2016. *Accounting Information Systems (9th ed.)*. Boston: Cengage Learning.
- Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). 2021. *Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta: IAI.
- Krismiaji. 2015. *Sistem Informasi Akuntansi*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Kurniawati, M., dan Yulianto, A. 2020. “Peran Sustainability Reporting dalam Meningkatkan Citra Perusahaan.” *Jurnal Akuntansi Kontemporer Indonesia*, 12(3): 145–156.
- Mulyadi. 2016. *Auditing (Pemeriksaan Akuntan)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Rahmawati, I. 2019. “Pendidikan Akuntansi dan Sertifikasi CPA di Indonesia.” *Jurnal Pendidikan dan Profesi Akuntansi*, 5(2): 87–95.
- Susanto, A. 2017. *Sistem Informasi Akuntansi: Struktur, Pengendalian, Risiko, dan Pengembangan*. Bandung: Lingga Jaya.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik.